

RINGKASAN

PROSES VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGERA (KPPN) SURABAYA I,, Nevi Yuan Agustin, NIM D42182128, Tahun 2022, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Maburur Dawami, S.Sos. (Pembimbing Lapang), dan Dessy Putri Andini, SE, MM (Dosen Pembimbing PKL).

Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan selama 1 (satu) semester penuh dan diprogramkan khusus pada mahasiswa semester VII (tujuh) bagi program-program studi yang menyelenggarakan program D-IV. Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan 20 sks yang dilaksanakan di Surabaya selama 900 jam setara dengan 5 (lima) bulan. Kegiatan ini merupakan persyaratan mutlak kelulusan yang harus diikuti oleh mahasiswa/mahasiswi Politeknik Negeri Jember. Praktik Kerja Lapang (PKL) bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan keterampilan khusus di dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) diharapkan mampu menerapkan ilmu-ilmu dengan lokasi PKL. Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan selama 900 jam atau setara 5 (lima) bulan efektif pada bulan September sampai dengan Januari. Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Proses dalam memverifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja melakukan kesesuaian dengan beberapa dokumen seperti berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, daftar rincian kas di rekening, laporan saldo rekening/rekening koran, dan nota konfirmasi penerimaan negara yang diterbitkan KPPN. Dari beberapa dokumen tersebut dapat menguji kesesuaian saldo awal, saldo uang di rekening bank, jumlah uang di brankas, kebenaran perhitungan, saldo uang persediaan, penyetoran ke kas negara, kepatuhan bendahara dalam penyetoran penerimaan negara (Bendahara Penerimaan), kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak, dan meneliti ijin rekening bendahara satuan kerja (Satker).